

LAPORAN DAN MONITORING RENCANA AKSI TW III



Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 20224 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dapat selesai tepat waktu. Laporan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penerbitan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta pada periode berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta) memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah maka dibuatlah Laporan Kinerja yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja

dapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta TW I tahun 2024 adalah:

Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan

sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta seperti berikut:

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan
Bab II Perencanaan Kinerja	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta 2024-2026 & Perjanjian Kinerja.
Bab III Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Menggambarkan kriteria ukuran keberhasilan, rencana akdi, capaian kinerja realisasi anggilan, menjelaskan factor pendukung dan factor penghambat capaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut
Bab IV Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan renstra telah mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang tatakelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

VISI: "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi ini mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta istimewa dalam nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif kontekstual mewujudkan purwakarta istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta maka sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, memberikan kontribusi terhadap misi 5 (lima) yang telah ditetapkan, yaitu:

Misi 5 : 'Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat'

Tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel. Adapun sasaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2024- 2026 sesuai periode renstra telah ditetapkan, tentang penetapan indikator kinerja utama Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta seperti berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Pada Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (80)	BB	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Predikat IKM hasil survey kepuasan masyarakat	Predikat	Baik	Baik	baik

Sumber : Dokumen SK IKU SETWAN Tahun 2024-2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Predikat IKM hasil survey kepuasan masyarakat	Predikat	Baik

Sumber : Dokumen TAPKIN SETWAN Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda	persen	100%

BAB III

Monitoring Dan Evaluasi

3.1 KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Pengukuran kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjuk secara langsung kaitan antara sasaran dan indikator kinerjanya. Keberhasilan sasaran berdasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan cara perbandingan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerjanya dengan rumusan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerjanya dengan rumusan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja : } \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian di kelompokkan kedalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Ordinal

PRESENTASE	PREDIKAT
<100	Tidak Tercapai
=100	Tercapai
>100	Melebihi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang di harapkan.

3.2 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun rencana aksi sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.3 CAPAIAN KINERJA

Adapun hasil capaian Rencana Aksi kinerja Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta untuk Triwulan II tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

TABEL 3.3
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kab.
Purwakarta Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Rp.	%					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	97.236.919.785	5.310.971.814	14.05	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100%
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	-	-
JUMLAH		97.236.919.785	5.310.971.814						

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.5.310.971.814,- atau 14,05% dari pagu anggaran sebesar **Rp. 97.236.919.785** dan indicator kinerja sasaran pada Sekretariat DPRD belum bisa di hitung realisasinya pada Triwulan II .

Capaian indicator kinerja saasaran yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indicator Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada tahun 2024 yaitu **A (80-90)** poin. Dan sampai dengan Triwulan II BELUM keluar nilai sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat belum bisa terhitung karena intensitas pelayanan pada Triwulan II masih belum dapat di simpulkan, penilaian IKM harus pada tahun berjalan dan di akhir periode Triwulan II V tahun 2024.
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah target kinerja nya yaitu BAIK. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat Penentuan bobot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dergan 15 (lima belas);
 - b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);

- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
- d. Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
- e. Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas); dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi :

- a. peringkat baik dengan nilai A
- b. peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, dan
- c. peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C

Adapun Realisasi Capaian kinerja Program Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta untuk Triwulan II tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

TABEL 3.4
Realisasi Capaian kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Triwulan II tahun 2024

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pokok Bahasan dan Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RPD Tahun Berjalan/Total (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 (TRIWULAN I & II)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 (TRIWULAN I & II)		Tingkat Capaian Kinerja/Realisasi Anggaran RPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja/Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja Tahun 2024	
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
	4.02.0.00	SEKRETARIAT DPRD					218.510.484.516		71.700.171.332		84.203.465.484		5.310.971.81											95,52	33,12	Sekretariat DPRD	SANGA TINGGI	
	4,02		SEKRETARIAT DPRD				218.510.484.516		71.700.171.332		84.203.465.484		5.310.971.81											95,52	96,65	Sekretariat DPRD		
Sasaran 1 :	4.02.0.01		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta				141.981.900.006		46.876.175.032		48.758.540.268		3.800.028.5												96,65	Sekretariat DPRD		
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B		B		B		BB		BB		BB				BB			114,29	BB		114,9	Sekretariat DPRD	MELAMP AU
				Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	Persentase	100		100		100		14,05		59,18		87,92				87,92			87,92	87,92		87,92	Sekretariat DPRD	TINGGI
Sasaran 14 :	4.02.0.02		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Purwakarta				76.528.584.516		24.823.996.306		35.444.925.216														38,54	Sekretariat DPRD		
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada)	Dokumen	Ada		Ada		Ada		14,05		56,57		Ada				Ada			100	Ada		100	Sekretariat DPRD	SANGA TINGGI

				Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada)	Dok u m e n	Ada		Ada		Ada		14,05		56,57		Ada				Ada		100		Ada		100	Sekretariat DPRD	SANGA T TINGG I
				Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi	Dok u m e	Ada		Ada		Ada		14,05		56,57		Ada				Ada		100		Ada		100	Sekretariat DPRD	SANGA T TINGG I

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 48.630.324.908,-** atau **48,24** dari pagu anggaran sebesar **Rp.92.121.765.654** dan indikator kinerja sasaran program pada Sekretariat DPRD belum bisa di hitung realisasinya pada Triwulan II serta Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 27 (Duapuluh Tujuh) Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan. Terealisasi mencapai target sebanyak 15 (Lima Belas) IKK dan tidak mencapai target sebanyak 12 (Dua Belas) indikator kinerja “Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)” dibawah target yang ditetapkan dikarenakan Adanya alokasi hibah pilkada serentak tahun 2024 sehingga, pengalokasian hibah secara formulasi mengurangi persentase rasio. Sedangkan terkait “Persentase belanja pendidikan (20%)” dan Persentase belanja kesehatan (10%)” sudah melampaui target yang ditetapkan di Permendagri 86 yaitu sebesar 20% untuk bidang Pendidikan dan 10% untuk bidang Kesehatan hanya saja tidak tercapai untuk target di resntranya. Untuk indikator “Bagi hasil kabupaten/kota dan desa” tidak tercapai karena Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purwakarta untuk Desa di hitung berdasarkan realisasi pada tahun berjalan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dengan 2023 berbeda formulasi perhitungannya, 2023 dengan satuan presentase dengan formulasi realisasi belanja / jumlah seluruh anggaran x 100 sedangkan tahun 2024 dengan satuan skor atau indeks dengan formulasi Skor rata-rata x Bobot.

Adapun Realisasi Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta untuk Triwulan II tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

TABEL 3.5
Realisasi Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Triwulan II tahun 2024

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.267.088.883		97%	100			9	9	kegiatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.928.400		60%	100	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.213.000	20.000.000	56%	100	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	dokumen
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.715.400		50%	100	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.676.755.229		92%	100	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	sub keg
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.600.544.529	1.521.409.984	52%	100	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Orang/bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.210.700		57%	50	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2	1	Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.325.261.888		85%	100	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat Daerah	3	3	sub keg
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	288.200.000		99%	100	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	12	paket
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	812.361.888		92%	92	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	92	Orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	224.700.000		40%	50	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100	50	Orang

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.964.950.000	2.964.950.000	96%	100	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	5	5	sub keg
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.993.000	149.993.000	33%	33	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	4	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	564.297.000	564.297.000	50%	100	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.992.910.000	1.992.910.000	59%	100	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.750.000	87.750.000	50%	100	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	170.000.000	59%	100	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.173.608.000	1.173.608.000	100%	100	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	1	sub keg
	Pengadaan Mebel	150.158.000	150.158.000	99%	100	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	723.450.000	723.450.000	100%	100	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	paket
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	100%	100	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	99%	100	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.057.077.381		96%	100	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3	3	sub keg
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	100%	100	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.014.477	49.218.937	53%	100	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.469.062.904	1.063.496.175	55%	100	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.176.620.600		100%	100	Meningkatnya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	sub keg
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	363.122.200	168.276.721	53%	100	Meningkatnya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	12	12	Unit

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	879.950.000	879.950.000		102%	100	Meningkatnya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	Un
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.933.548.400	1.933.548.400		100%	100	Meningkatnya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	12	Un
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	37.518.612.885	37.518.612.885		99%	100	Tersusunnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	3	3	sub k
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	36.868.612.885	36.868.612.885	3.029.737.380	59%	100	Tersusunnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak keuangan DPRD	14	14	Orang/l
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	550.000.000	550.000.000		97%	100	Tersusunnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah paket pakain dinas dan atribut DPRD yang disediakan	100	100	pak
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000	100.000.000		90%	100	Tersusunnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical chek up DPRD	45	45	Oran
	Layanan Administrasi DPRD	1.198.274.500	1.198.274.500		99%	100	MeningkatnyaLayanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	1	sub k
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.198.274.500	1.198.274.500		99%	100	MeningkatnyaLayanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12	12	Lapor
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	38.382.968.966	38.382.968.966		96%	100			6	6	kegia
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10.283.716.000	10.283.716.000		91%	100	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan Dearah	5	5	sub k
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	809.215.000	809.215.000		50%	100	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12	12	Dokur
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7.682.699.000	7.682.699.000		51%	100	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil PembahasanRancangan Peraturan Daerah	10	10	Dokur
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	248.802.000	248.802.000		52%	100	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	12	12	Dokur
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.103.540.000	1.103.540.000		59%	100	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	6	Dokur
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	439.460.000	439.460.000		91%	100	Meningkatnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen penyusunan Tata tertib DPRD yang disusun	1	1	Dokur
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.936.689.800	1.936.689.800		93%	60	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	TerlaksananyaPembahasan Kebijakan Anggaran	5	3	sub k
	Pembahasan KUA dan PPAS	203.354.000	203.354.000		56%	100	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijaka Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	Dokur
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	339.136.000	339.136.000		59%	100	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	Dokur

	Pembahasan APBD	447.245.800	447.245.800		83%	100	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	Dokumen
	Pembahasan APBD Perubahan	273.360.000	273.360.000		91%	100	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	Dokumen
	Pembahasan Laporan Semester	347.581.000	347.581.000		97%	100	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan Laporan Semester	1	1	Dokumen
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	326.013.000	326.013.000		99%	100	Meningkatnya kualitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	1	Dokumen
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	281.888.000	281.888.000		73%	100	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan an	4	4	sub keg
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	71.827.000	71.827.000		79%	75	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	9	Laporan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	69.847.000	69.847.000		77%	75	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12	9	Laporan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	72.047.000	72.047.000		68%	67	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12	8	Laporan
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	68.167.000	68.167.000		68%	67	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12	8	Laporan
	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.080.152.000	4.080.152.000		99%	100	Meningkatnya kualitas Kapasitas DPRD	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	5	5	sub keg
	Orientasi DPRD	544.530.000	544.530.000		97%	100	Meningkatnya kualitas Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Orientasi DPRD	1	1	Dokumen
	Pendalaman Tugas DPRD	1.799.726.000	1.799.726.000		101%	100	Meningkatnya kualitas Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	10	10	Dokumen
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	898.936.000	898.936.000		99%	100	Meningkatnya kualitas Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12	12	Dokumen
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	300.000.000	300.000.000		98%	100	Meningkatnya kualitas Kapasitas DPRD	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	12	12	bulan
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	536.960.000	536.960.000		97%	100	Meningkatnya kualitas Kapasitas DPRD	Jumlah tenaga ahli Fraksi	12	12	bulan
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.351.350.950	4.351.350.950		98%	100	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terselenggaranya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2	2	sub keg
	Pelaksanaan Reses	4.351.350.950	4.351.350.950		98%	100	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	Dokumen
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	471.320.000	471.320.000		89%	100	Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	Dokumen
	Penyusunan Kode Etik DPRD	471.320.000	471.320.000		89%	100	Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	Dokumen

	Fasilitasi Tugas DPRD	16.977.852.216	16.977.852.216	98%	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	3	sub keg
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.300.531.000	11.300.531.000	59%	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	35	35	Dokumen
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.608.932.216	1.608.932.216	22%	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6	6	Dokumen
-	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.068.389.000	4.068.389.000	100%	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	12	Dokumen
TOTAL										

penyerapan anggaran masih kecil yaitu **14.05 %** atau hanya terealisasi sebesar **Rp.48 MILIAR LEBIH.-** dari anggaran sebesar **Rp.97 MILIAR,-** Pada awal tahun (Triwulan II) kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin seperti :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu sub Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.031.253.060,-
- Kegiatan penyelenggaraan administrasi DPRD.3.000.000.000,-
- Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 1.294.000.000
- Kegiatan Pendidikan dan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- KEGIATAN sosialisasi peraturan perundang undangan

Dengan ini maka perlu di lakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang agar pencapaian kinerja semua kegiatan dapat tercapai

sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana aksi sekretariat DPRD

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024. Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan telah tercapai, seperti capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Predikat “BAIK”, Indeks pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Predikat “BAIK” , Capaian SAKIP dengan predikat "A" dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan perolehan predikat "Sangat Baik". Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk Triwulan II tahun 2024, realisasi total belanja dari dana APBD Kabupaten Purwakarta adalah sebesar Rp. 97.765.913.351,00.- (18.240/o) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. LIMA MILIAR LEBIH-.

4.2 Saran

Dalam upaya menjaga konsistensi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka Sekretariat DPRDh Kabupaten Purwakarta merumuskan beberapa strategi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk saran melaksanakan optimalisasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta percepatan penyusunan dokumen kontraktual.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

Purwakarta, 3 April 2024

Nomor : Tv.02/1008/IV/PKP-

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : Undangan

Kepada:

Yth. Seluruh Pejabat Struktural
dan Sub-Koordinator di
Lingkup Sekretariat DPRD
Kabupaten Purwakarta

Di –

PURWAKARTA

Sehubungan dengan akan di laksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, maka kepada seluruh Seluruh Pejabat Struktural dan Sub-Koordinator di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten purwakarta agar dapat hadir menyampaikan progress terkait evaluasi program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024 yang akan di laksanakan pada :

Hari/ : Kamis , 12
Tanggal september 2024

Waktu : 08.00 s/d Selesai

Tempat : SEKRETARIAT DPRD

Demikian agar maklum dan menjadi perhatian bersama.

Sekretariat DPRD Kabupaten
Purwakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. SUHANDI, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DPRD

NOTULEN

Sidang/Rapat : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II
Hari/Tanggal : Rabu, 4 April 2024
Waktu Panggilan : 08.00
Waktu Sidang/Rapat : 08.00 s/d Selesai

HASIL MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TA. 2024

Kegiatan Rapat

- Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala Sekretariat DPRDKabupaten Purwakarta sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu sub Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Evaluasi kinerja perangkat daerahdengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.031.253.060,-
 - Kegiatan penyelenggaraan administrasi DPRD.3.000.000.000,-
 - Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umu kantor 1.294.000.000

